



## B. Sejarah Lahirnya Kabupaten Pamekasan

Kabupaten Pamekasan lahir dari proses sejarah yang cukup panjang, istilah Pamekasan sendiri baru dikenal pada sepertiga abad ke-16, ketika Ronggosukowati mulai memindahkan pusat pemerintahan dari Kraton Lambangan Daja ke Kraton Mandilaras. Memang belum cukup bukti tertulis yang menyebutkan proses pemindahan pusat pemerintahan sehingga terjadi perubahan nama wilayah ini. Begitu juga munculnya sejarah pemerintahan di Pamekasan sangat jarang ditemukan bukti-bukti tertulis apalagi prasasti yang menjelaskan tentang kapan dan bagaimana keberadaannya. Tulisan-tulisan yang kemudian mulai memperkenalkan sejarah pemerintahan Pamekasan ini pada awalnya lebih banyak ditulis oleh penulis Belanda dan kemudian mulai diterjemahkan atau ditulis kembali oleh sejarawan Madura, seperti Zainal Fatah ataupun Abdurrahman.

Kemunculan sejarah pemerintahan lokal Pamekasan, diperkirakan baru diketahui sejak pertengahan abad ke-15 berdasarkan sumber sejarah tentang lahirnya mitos atau legenda Aryo Menak Sunoyo yang mulai merintis pemerintahan lokal di daerah Proppo atau Parupuh. jauh sebelum munculnya legenda ini, keberadaan Pamekasan tidak banyak dibicarakan. Diperkirakan Pamekasan merupakan bagian dari pemerintahan Madura di Sumenep yang telah berdiri sejak pengangkatan Arya Wiraraja pada tanggal 31 Oktober 1268 oleh Kertanegara.

Masa pencerahan sejarah lokal Pamekasan mulai terungkap sekitar paruh kedua abad ke-16, ketika pengaruh Mataram mulai masuk di Madura.





















Kerapan Sapi merupakan pariwisata andalan yang banyak mendatangkan Wisatawan Manca Negara dan Wisatawan Nusantara. Sebagai tradisi tahunan kerapan sapi cukup mendapat perhatian tinggi bagi masyarakat Madura, karena tradisi kerapan sapi yang belangsung secara turun temurun yang konon dimulai sejak abad ke-15 (1561 M) dipelopori oleh Pangeran Katandur dalam menyambut peristiwa budaya ini, yang diawali sejumlah acara-acara pentas seni tradisi, yang secara langsung dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan sebagai wilayah Bakorwil Madura.

Budaya ini memiliki ciri khas sendiri karena jarang terdapat di daerah lain selain di Madura khususnya Kabupaten Pamekasan. Selain itu, tradisi ini sudah mendarah daging ditengah-tengah masyarakat Pamekasan karena digelar setiap tahun pada moment tertentu yang dipadu dengan serangkaian acara yang disajikan dalam pagelaran tersebut. Dari tahun ke tahun tradisi ini tidak akan pernah lepas dan disenangi oleh kebanyakan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Meski demikian, lambat laun tradisi yang sudah puluhan tahun menghiasi sendi-sendi kehidupan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang praktek penyiksaan terhadap sapi-sapi yang diikutkan dalam pelaksanaan acara kerapan sapi karena para joki biasanya menggunakan alat yang dipukulkan di pantat sapinya. Alat ini kerap disalah gunakan yaitu dengan menggunakan benda tajam (paku dan sejenisnya) yang dipukulkan (digaruk-garukkan) di pantat sapi sehingga sapi terasa sakit dan secara spontan akan berlari lebih kencang. Cara ini memang sejak awal ditolak oleh masyarakat lantaran dengan menggunakan alat tersebut

sama artinya dengan melukai dan menyiksa. padahal pada awalnya, kegiatan kerapan sapi ini diniatkan sebagai bentuk kecintaan kepada hewan agar sapi biasa terawat dengan baik disamping sebagai hiburan dalam mengakhiri musim kemarau.

Inilah sebabnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) sangat melarang melakukan penyiksaan terhadap binatang, yang kemudian MUI melakukan pengiriman surat ke Kantor Bakorwil 4 Pamekasan. dalam surat bernomor: 073/DPK.MUI/09/2011, tertanggal 18 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh tiga perwakilan Ormas Islam Pamekasan yaitu; oleh Ketua MUI Pamekasan yaitu KH. Ali Rahbini Abdul latif, Ketua Forum Ormas Islam (Fokus) KH. Abd Ghaffar, dan Ketua Lembaga Pengkajian dan Penerapan Syariat Islam (LP2SI) Moh Zahid. Selain ditujukan kepada Bakorwil 4 Pamekasan, Madura, selaku pelaksana festival kerapan sapi, surat MUI bersama Ormas Islam lainnya ini juga ditembuskan ke Kapolres, Komandan Kodim 0826, Ketua DPRD dan Ketua Pengadilan Negeri Pamekasan. Hal ini disebutkan empat tuntutan para ulama, yaitu sebagai berikut:

1. MUI meminta agar unsur penyiksaan binatang dalam pelaksanaan kerapan sapi memperebutkan Piala Presiden yang akan digelar pada 23 Oktober 2011 ini dihapus.
2. Praktek perjudian dalam pelaksanaan kerapan sapi dihapus.
3. Meminta agar masyarakat tidak mengabaikan kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. sebab, setiap ada festival kerapan sapi baik di tingkat

